GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS **Tgl/Bln/Thn : 23/05/2006**
Subyek : Kebakaran Hutan **Hari : SELASA**
Halaman : 23

Pemda Kendalikan Kebakaran
Masyarakat Akan Bekerja Sama dengan Pemda Atasi Kebakaran

Pontianak, Kompas - Lima pemerintah provinsi dan 32 pemerintah kota/kabupaten dari Sumatera dan Kalimantan sepakat untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Kelima pemerintah provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara.

Kelima pemerintah provinsi dan 32 pemerintah kabupaten tersebut pada Selasa (22/5) di Pontianak menandatangani Kesepakatan Pemerintah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden pada Hari Bumi 22 April 2006 lalu kepada Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan Gubernur se-Kalimantan dan Sumatera agar menghentikan "ekspor asap".

"Pada prinsipnya bukan saja meminimalisasi asap dari kebakaran hutan, tetapi mengurangi timbulnya asap dari berbagai pembakaran seperti kendaraan bermotor," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar di Pontianak.

Dalam pertemuan Menneg LH, Departemen Kehutanan, dan Departemen Pertanian dengan para gubernur dan bupati/wali kota daerah rawan kebakaran hutan dan lahan se-Sumatera dan Kalimantan, masyarakat dan pelaku usaha juga mengeluarkan deklarasi serupa.

Kesepakatan pemerintah yang dibacakan Bupati Sanggau-Kalimantan Barat Yansen Akun Effendi menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengawasi aktivitas pembakaran, mengalokasikan anggaran pemadaman kebakaran, dan menegakkan hukum bagi para pembakar. Dukungan serupa didapatkan dari 21 instansi pemerintahan dan 85 perusahaan pada acara berbeda seusai deklarasi tersebut.

Deklarasi masyarakat

Deklarasi masyarakat berisi dua hal utama yakni, berjanji bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lain untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak melakukan pembakaran. Acara berlangsung di Balai Betitih, Kantor Gubernur Kalbar. Seusai acara, kendaraan Menneg LH dihalangi sekitar 50 mahasiswa. Mahasiswa berniat melaporkan kondisi sosial Kalbar, mulai dari dugaan korupsi, ketidakpuasan terhadap Gubernur Kalbar Usman Jaffar, dan dukungan terhadap RUU Antipornografi dan Pornoaksi. (ryo)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP